

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Hasil**

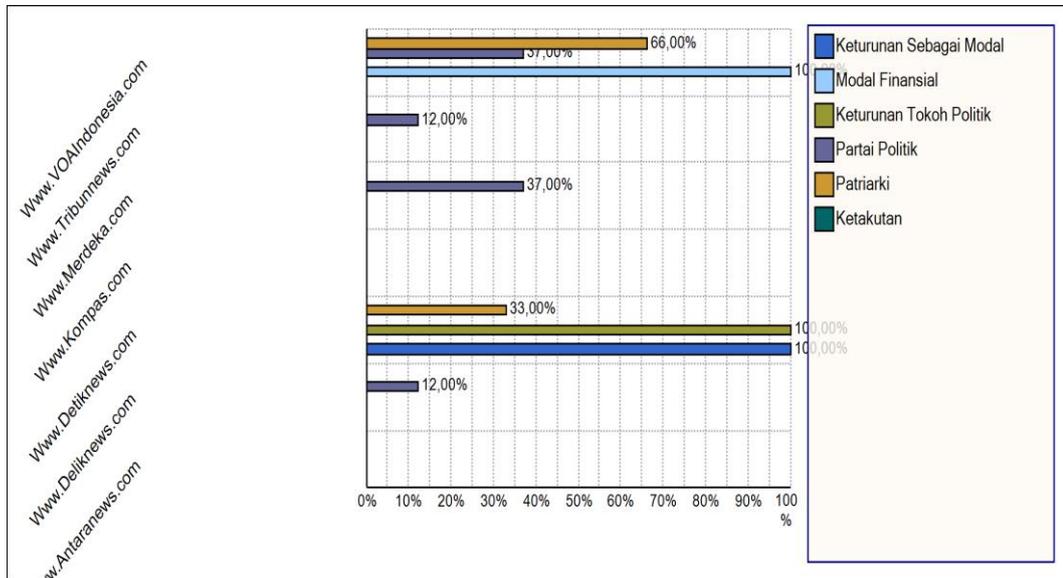
#### **Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhi**

Bergerak dari analisis politik modern di era sekarang, partisipasi politik menjadi persoalan yang penting, dan sekarang banyak dipelajari terkait hubungannya dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik pada awalnya memfokuskan diri pada partai sebagai jembatan, tetapi dengan berkembangnya demokrasi saat ini, begitu banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mengambil/ mempengaruhi kebijakan. Menurut S. Huntington dan J. M. Nelson (dalam Budiardjo, 2013) Partisipasi politik yaitu warga negara yang berkegiatan dan bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud dapat mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Berpartisipasi bisa dilakukan dengan sendiri maupun dengan kelompok, terorganisir, dan sporadis, dengan damai ataupun dengan kekerasan, ilegal ataupun legal, efektif maupun sebaliknya (*citizens who are involved and act as individuals, with a view to influencing government policy making. Participating can be done with groups themselves, organized, and sporadically, peacefully or violently, illegally or legally, effectively or vice versa*). Kegiatan yang menunjukkan berbagai bentuk dan intensitasnya dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik. Biasanya mempunyai perbedaan jenis

partisipasi berdasarkan dari keseringan dan kesungguhannya. Orang mengikuti kegiatan secara intensive, yaitu kegiatan yang tidak banyak membuang waktu secara percuma dan tidak dari gagasan sendiri (contohnya seperti dalam memberikan hak politik dalam pemilu). Sebaliknya, sangat minim jumlah orang yang secara sering dan sepenuh waktu mengikutsertakan diri dalam politik. Gerakan sebagai aktifis ini mencakup antara lain menjadi pemimpin partai politik atau kelompok yang mempunyai kepentingan.

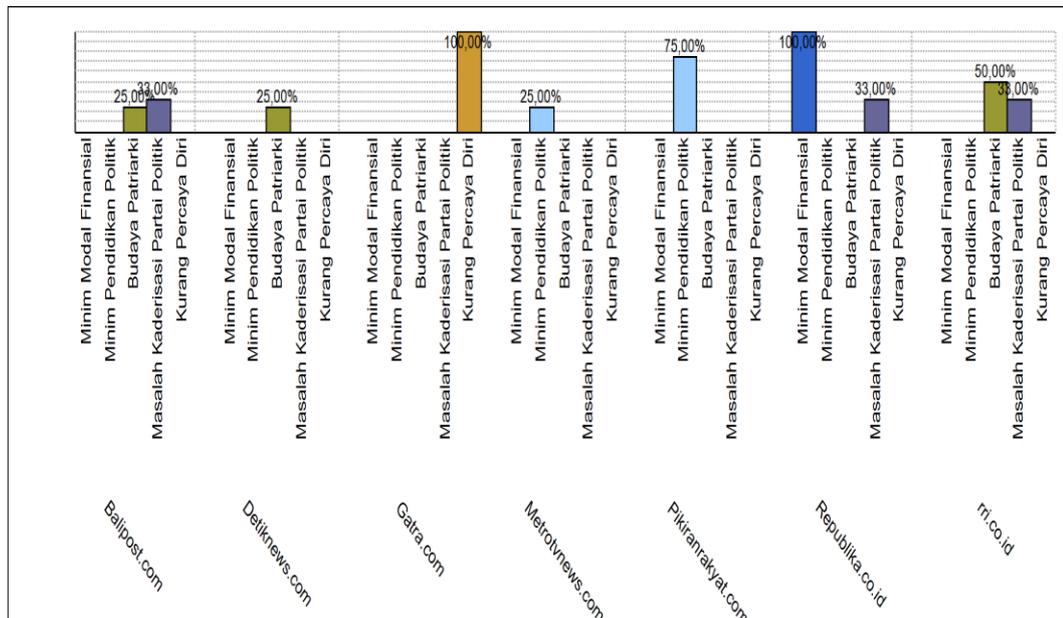
Dalam negara berkembang nonkomunis banyak menunjukkan pengalaman yang bermacam-macam. Negara baru dengan cepat ingin pembangunan dapat dilakukan dengan segera untuk mengejar keterbelakangannya, karena banyak yang beranggapan bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada partisipasi rakyatnya. Keikutsertaan rakyatnya dalam menangani masalah-masalah yang muncul dari perbedaan-perbedaan status sosial, etnis, agama, budaya dan ekonomi. Melalui partisipasi politik dapat merubah situasi menjadi lebih baik, dalam pembentukan identitas negara, serta loyalitas kepada negara.

**Grafik 1.0 Faktor yang Mempengaruhi**



Sumber: (Crosstab Query Analysis with Nvivo 12 Plus, 2019)

**Grafik 2.0 Faktor yang Mempengaruhi**



Sumber: (Crosstab Query Analysis with Nvivo 12 Plus, 2019)

## 5.2 PEMBAHASAN

Di Indonesia, peran perempuan didalam dunia politik secara statistik belum bisa dibilang berkontribusi atau belum menggembirakan. Dapat dilihat

berbagai hasil pemilu dari periode ke periode selanjutnya. Dalam bidang politik termasuk pada posisi yang strategis/ pimpinan yang dapat menentukan kebijakan dipemerintahan baik ditingkat daerah maupun pusat masih relatif kecil, dan didominasi oleh para laki-laki. Tidak berarti tokoh politik perempuan yang ada dipemerintahan tidak ada, masih sangat kecil jika dijumlah daripada tokoh politik laki-laki.

Rendahnya tingkat pendidikan wanita terhadap politik. Kondisi seperti ini yang sering dirasakan bahwa sesungguhnya sangat sulit untuk merekrut/ men-seleksi para perempuan yang mempunyai kemampuan dalam bidang politik, yang seharusnya bisa dapat bersaing dengan para laki-laki. Sistem multi-partai, banyaknya jumlah partai politik yang ikut bersaing di Indonesia untuk memenangkan kedudukan di parlemen, karena disetiap partai sangat optimis dalam memperjuangkan segala hal untuk berada diparlemen atau bahkan dieksekutif.

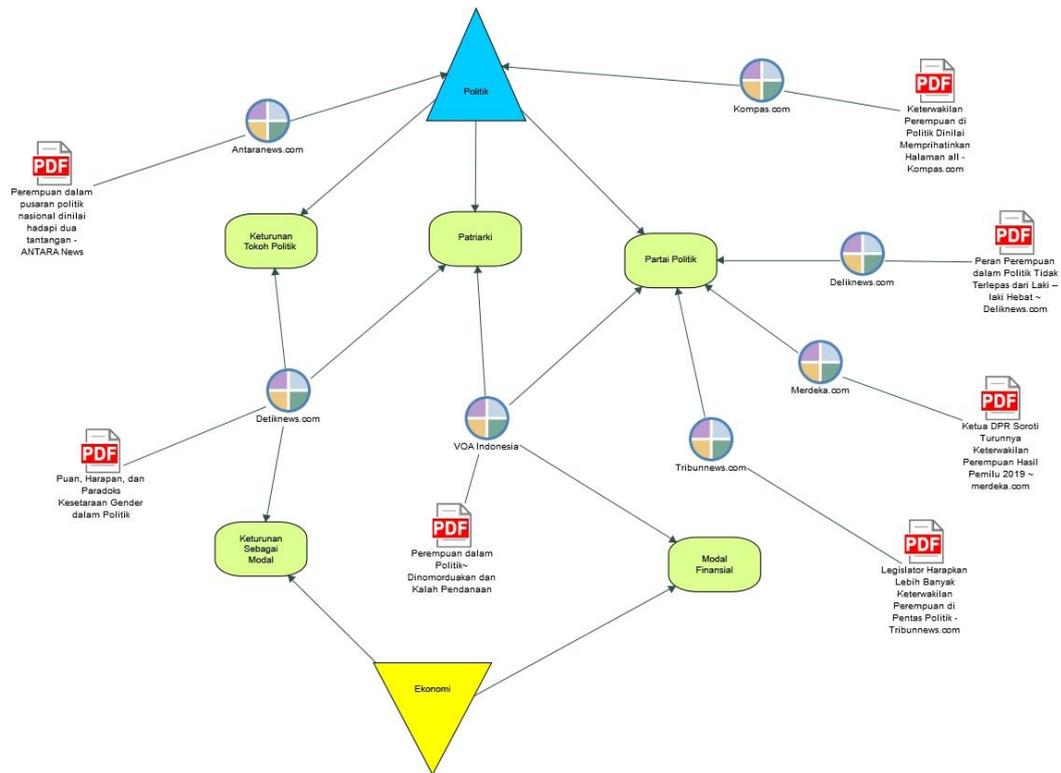
Berdasarkan **Grafik 1.0** diatas bahwa dari sektor ekonomi lumayan dominan dalam mempengaruhi keterlibatan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. Dari sektor ekonomi diatas peneliti dapat membagi dalam dua kategori: *Pertama*, Modal sebagai rintangan tersendiri mengapa kurangnya keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia. Terkhusus di Indonesia sendiri jika ingin berpartisipasi dalam politik praktis mempunyai modal yang terbilang besar hingga mendapatkan posisi yang baik. Menurut Piere Bourdieu (dalam Halim, 2014) modal sangat berkaitan erat dengan persoalan kekuasaan.

Dalam sebuah kelompok politik, persoalan dominasi termasuk problem utama sebagai bentuk aktualisasi kekuasaan.

Modal didefinisikan secara luas dan meliputi hal material yang mempunyai nilai simbolik maupun atribut yang tidak tersentuh namun juga memiliki nilai secara kultural, misalnya wibawa, otoritas dan status sebagai modal simbolik, juga modal budaya yang didefinisikan sebagai selera berbudaya dan pola konsumsi. Modal juga mempunyai fungsi, menurut Bourdieu adalah sebagai hubungan sosial dalam sebuah sistem pertukaran, mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang langka, yang layak dicari dalam bentuk sosial tertentu. Modal dalam bentuk simbolik inilah yang dikenali sebagai sesuatu yang legitimit. *Kedua*, Adanya keturunan tokoh politik sebagai modal agar bisa ikut berpartisipasi ke dalam politik dan mendapatkan posisi yang diinginkan karena adanya garis keturunan. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang sosiolog Meksiko, bahwa “*pentingnya garis keturunan untuk menggambarkan posisi seseorang dalam hierarki masyarakat*”.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik yaitu berdasarkan dengan beberapa variabel yang sudah ditentukan, seperti: *Pertama*, Partai politik yang kurang memberikan kesempatan untuk para perempuan untuk bergabung, dan kurang percaya terhadap perempuan dalam menempatkan diri diforum-forum tertentu. *Kedua*, Patriarki yang sudah menjadi budaya untuk menghambat peran perempuan dalam politik praktis, dan perempuan juga dinomorduakan dalam membuat keputusan. Banyak perempuan yang tidak ikut serta dalam politik karena alasan budaya patriarki yang sangat kental.

**Gambar 5.0**



*Sumber: (Concept Map with Nvivo 12 Plus, 2019)*

Menurut Bhalotra (dalam Angin et al, 2018) target 30 persen kandidat perempuan tidak mudah diwujudkan oleh partai politik. Partai politik masih sulit untuk menerapkan kebijakan tersebut, karena jumlah perempuan dari partai politik masih terbatas jumlahnya. Budaya patriarki masih menjadi penghalang bagi gerakan perempuan. *Ketiga*, Keturunan tokoh politik yang hanya bisa/ tertarik ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Dapat menjanjikan karena garis keturunan yang sudah mempunyai basis massa atau pemahaman seperti apa rintangan yang ada didalam politik.

Menurut Milbrath dan Goel, partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dari warga negara yang ingin berusaha agar dapat mempengaruhi serta

mendukung pemerintah dan politik. Kondisi seperti ini dapat berimplikasi yang sangat luas karena tidak hanya untuk berperan aktif yang diikuti oleh masyarakat untuk mempengaruhi proses politik dan dampak positifnya yang banyak, tapi juga simbolik atas dukungan dalam kegiatan (Mantovani & Santoso 2015).

Dalam pembahasan Rancangan Undang-undang sampai dengan disahkannya menjadi Undang-undang Pemilu tahun 2003 menjadi perjuangan perempuan, telah tercantum kuota 30 persen yang seharusnya dapat mengubah paradigma berfikir yang tadinya patriarkis ke cara berfikir yang lebih modern, menekankan kesetaraan gender. Pembagian kerja yang terus dipertahankan dalam ideologi patriarki, para ahli filsafat yang mempertahankan patriarki seperti Whitbeck, Engels, Aristoteles, dan lain-lain. Berbeda halnya dengan Stuart Mill tahun 1869 yang menggugat pandangan Aristoteles, dkk. Stuart Mill mengatakan bahwa perempuan atau laki-laki adalah hasil dari pendidikan. Namun pada kenyataannya konsep Mill yang lebih melihat ada rekayasa politik agar dapat mengunggulkan peran dari laki-laki yang masih saja terus diperdebatkan dan belum bisa diterima (Sahi, 2012).

Meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dalam bidang politik menjadi tuntutan yang harus dapat diimbangi dengan menjamin bahwa perempuan yang menjadi legislatif memang benar-benar harus mempunyai kualitas, dan mampu untuk memperjuangkannya. Didalam pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 (Konstitusi) “wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria”, dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang hukum.

Perempuan dan laki-laki mempunyai hak dalam memilih ataupun dipilih. Namun pada kenyataannya presentase perempuan terpilih menjadi anggota legislatif dalam tahun 2019 sudah mulai meningkat walaupun ada beberapa catatan yang harus dibenahi.

### **Budaya Patriarki**

Tema yang tidak kunjung usai adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Erich Fromm (dalam Nurcahyo, 2016) pertentangan dapat terjadi hubungan kedua jenis kelamin ini sudah berlangsung sekitar enam ribu tahun silam. Dalam hubungan ini sudah menjadi persoalan ketika terjadi ketimpangan serta terdapat relasi subordinasi. Dari bentuk penantangan para perempuan atas kehendak laki-laki tidak dapat dilepas dari patriarki, yang hanya menempatkan perempuan sebagai bayang laki-laki. Terciptanya konstruksi sosial bawasannya perempuan adalah kelompok yang lemah, baik hati maupun fisiknya (Sakina, 2017). Budaya patriarki ini memposisikan laki-laki menjadi kelompok yang paling gagah, dan mempunyai keleluasaan dalam melakukan apapun itu terhadap perempuan. Hal ini berdampak pada tingginya angka pelecehan seksual di Indonesia. Berhubungan dalam konteks budaya yang ada di Indonesia masih sangat dominan pada patriarkinya. Hal ini sering menjadi acuan pada pendapat yang sering didengar, yaitu bidang politik hanya untuk para laki-laki, jadi oleh sebab itu tidak pantas bagi para perempuan untuk menjadi salah satu dari bagian itu .

## **Keturunan Tokoh Politik**

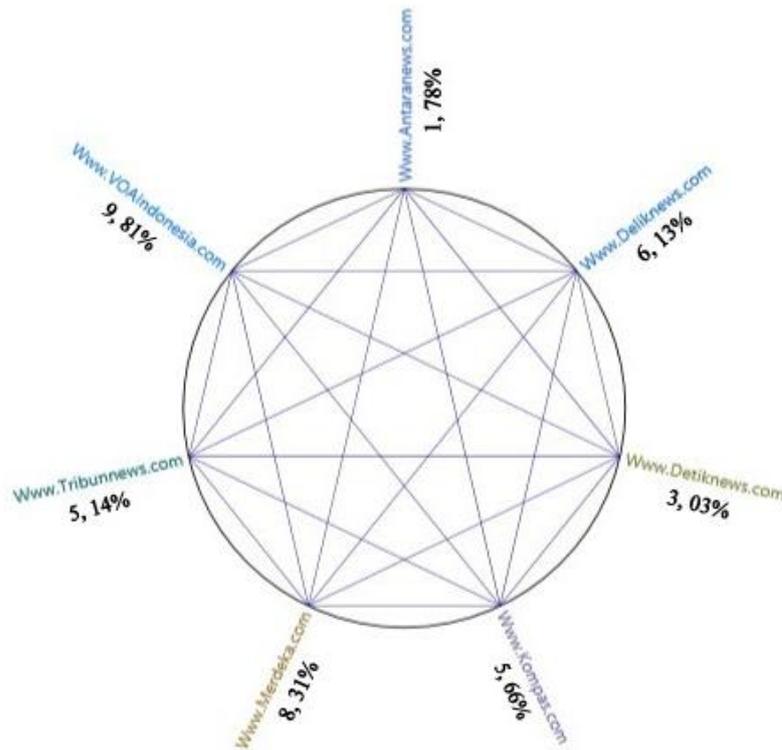
Budaya politik familisme adalah sesuatu fenomena yang sangat kuat di Indonesia. Yang dapat mempengaruhi lahirnya politik dinasti, dilihat dari bentuk hubungan darah langsung dan afeksi, solidaritas dan kepercayaan (quasi-familisme) hingga (egois-familisme). Ini adalah wujud norma serta nilai budaya yang berkembang digolongan masyarakat, cocok atau tidaknya dalam budaya Indonesia bisa dilihat/ diukur dari kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat yang dimiliki oleh seorang pemimpin dengan tujuannya.

## **Pendidikan Politik**

Proses dalam pengubahan sikap dan prilaku seseorang atau kelompok dalam mendewasakan manusia dengan mengupayakan pendidikan. Hal ini sangat berperan dalam penyerapan atau kemampuan dalam berkomunikasi. Pendidikan politik bertujuan untuk membentuk orientasi politik pada setiap individu. Meliputi konsep yang mendasar atas pemaknaan politik serta bagaimana mencari solusi atas kepentingan bersama dengan keputusan-keputusan dalam tata bernegara yang baik. Sikap politik dalam berkomunikasi menjadi sesuatu yang penting, mempunyai etika, moral, serta akhlak yang baik. Selain itu bertujuan untuk serta hadir ataupun aktif ditengah masyarakat maupun organisasi yang ada. Pendidikan politik adalah aktifitas yang terus menerus berlanjut dalam kehidupan manusia, yang membentuk kesadaran,

kepribadian, serta partisipasi. Pendidikan politik juga memiliki dasar ideologis, sosial-politik (Soeharto, 2011).

**Gambar 6.0 Konektivitas**



*Sumber: (Cluster Analysis with Nvivo 12 Plus, 2019)*

Berdasarkan gambar 6.0 cluster analysis diatas, menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi perempuan dalam dunia politik yaitu, keturunan tokoh politik sebagai modal, modal finansial, partai politik yang kurang memberikan kepercayaan pada perempuan, patriarki, minim pendidikan politik, kurang percaya diri.

Selain menunjukkan konektivitas antara beberapa media dan mendapatkan beberapa variabel permasalahan yang ada dalam partisipasi, analisis cluster juga menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai tingkat

kepadatan konektivitas (jumlah garis penghubung) antara media-media yang relevan dan dipilih sesuai dengan popularitas media tersebut. Tinggi nilai kesamaan konten dari masing-masing media yang dianalisis bergantung pada frekuensi kata yang dibentuk oleh para informan media tersebut (Howard, Kelly, and François 2018). Gambar diatas menunjukkan bahwa adanya nilai kesamaan konten dari beberapa media website yang dibentuk oleh masing-masing media, dimana untuk media [Www.VOAIndonesia.com](http://www.voaIndonesia.com) 9,81%, disusul oleh [Www.Merdeka.com](http://www.Merdeka.com) 8,31%, [Www.Deliknews.com](http://www.Deliknews.com) 6,13%, [Www.Kompas.com](http://www.Kompas.com) 5,66%, [Www.Tribunnews.com](http://www.Tribunnews.com) 5,14%, [Www.Detiknews.com](http://www.Detiknews.com) 3,03%, [Www.Antaranews.com](http://www.Antaranews.com) 1,78%. Nilai-nilai kesamaan konten tersebut menunjukkan bahwa masing-masing media memproduksi narasi dan opini politik dari informan yang berhubungan dengan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia.

Berdasarkan **Grafik 2.0 Crosstab Query** diatas dari sumber beberapa website yang relevan, masih terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan, dan terdapat juga permasalahan dari tahun ketahun belum bisa diminimalisir. Seperti, Pertama Minimnya pendidikan politik yang masih menjadi hambatan para perempuan dalam berpartisipasi dalam bidang politik. Kedua, Patriarki yang sudah menjadi budaya, hal ini menjadi catatan penting yang harus ditindaklanjuti bersama dalam membuat kebijakan yang lebih menekankan kesetaraan gender dalam legislatif maupun eksekutif. Ketiga, Masalah kaderisasi partai politik dari tahun ketahun yang menggagap para perempuan hanya sebagai pemanis panggung politik, yang tidak dilihat dari kualitasnya.

Dan perempuan hanya sebagai syarat administratif agar bisa ikut dalam pemilu, perempuan yang dipilih juga hanya mengandalkan popularitas, bukan dilihat dari kualitasnya. Keempat, Modal finansial menjadi catatan terakhir dalam permasalahan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memiliki makna sebagai “penggerak” dan menjadi “pelumas” mesin politik yang dipakai. Didalam musim kampanye membutuhkan uang yang besar untuk bisa membiayai berbagai kebutuhan, misalnya pencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai keperluan lainnya. Permasalahan yang terakhir yaitu kurangnya percaya diri dalam ikut berpartisipasi dalam politik. Perempuan tidak mudah dalam menentukan keputusan dibandingkan dengan pria. Karena perempuan lebih perhatian ke detail dan multitask sehingga saat mengambil keputusan penuh dengan pertimbangan.



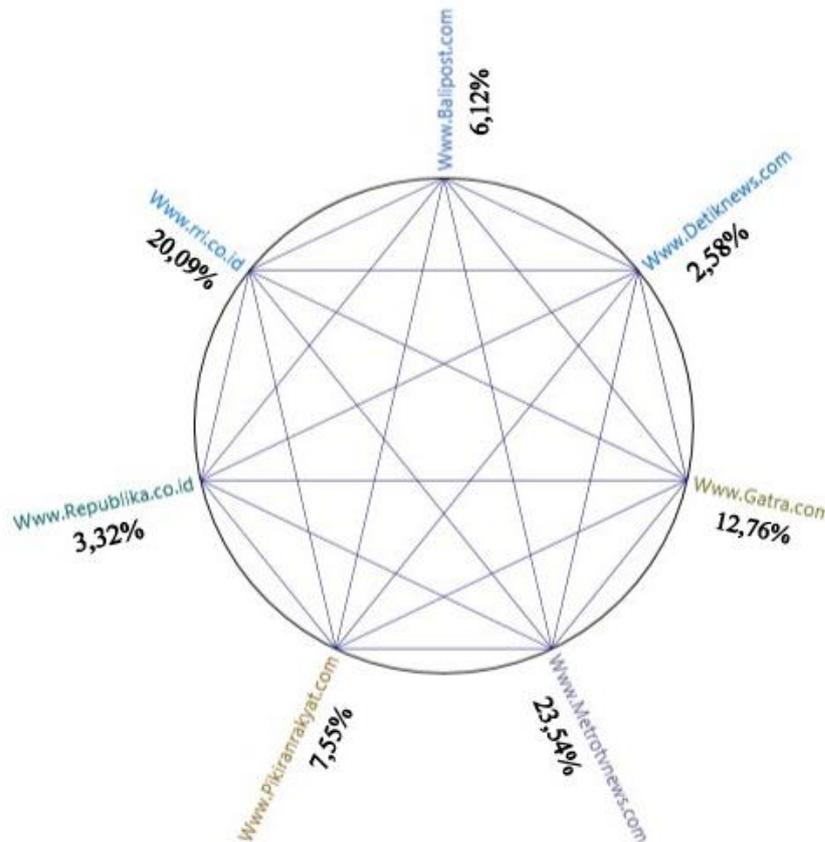
[www.balipost.com](http://www.balipost.com), [www.rri.co.id](http://www.rri.co.id), [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) bahwa budaya patriarki menjadi permasalahan dari tahun ketahun dalam minimnya perempuan berpartisipasi dibidang politik. Permasalahan kaderisasi partai politik yang belum memaksimalkan kebijakan yang ada, serta minimnya modal finansial yang menjadi tantangan bagi perempuan dalam ikut berpartisipasi dalam politik (legislatif dan eksekutif). Dan minimnya pendidikan politik bagi perempuan ([www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com), [www.pikiranrakyat.com](http://www.pikiranrakyat.com)). Namun dari keempat problem yang ada, setiap tahun masih didominasi permasalahan yang sama dan menjadi rintangan untuk perempuan, ada tantangan yang lain jika berpartisipasi dalam politik, yaitu seperti yang dilansir dalam [www.gatra.com](http://www.gatra.com) menyebutkan bahwa kurangnya perempuan dalam bidang politik karena mereka kurang percaya diri dalam memberikan pendapat atau solusi.

Berhubungan pada faktor seleksi yang dilakukan dalam partai politik; Media selalu berperan dalam mewujudkan opini publik bahwa pentingnya partisipasi perempuan; Kurangnya jaringan atau bahkan tidak ada sama sekali jaringan antar organisasi, LSM, maupun partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Kehadiran perempuan hanya sebagai pemanis politik (Abdullah, 2016). Orang yang terlibat dalam politik praktis seharusnya mempunyai tuntutan sejarah demokrasi Indonesia yang membutuhkan proses pembelajaran yang sangat panjang. Yang sering masuk kedalam politik hanya jajaran artis bukan berasal dari masyarakat umum. Keterlibatan dalam politik masih membutuhkan popularitas dan uang. Dan dari banyak kasus yang ada bahwa uang merupakan indikator yang sangat signifikan dalam kemenangan.

Tidak jarang para perempuan yang terlibat dalam politik memiliki/berasal dari latar belakang aktivis politik ataupun sudah menguasai kehidupan politik. Faktor emosional yang paling sering terjadi dalam partisipasi perempuan dalam politik, karena hanya melihat dari sisi agama dan suku (Yuriska, 2015). Adanya pengaruh dari orang tua, suami, maupun keluarga serta kerabat yang mempunyai pengalaman dalam bidang politik. Sehingga dapat mempengaruhi anak (Susanti, 2015).

Kebanyakan orang yang berpendapat bahwa dalam dunia politik adalah dunia yang keras. Jika perempuan ikut berpartisipasi didalamnya tidak akan cocok. Hal ini juga menjadi sesuatu yang buruk bagi perempuan. Karena sesuatu yang diisi oleh laki-laki dalam panggung politik pasti sangat dominan pada pembuatan kebijakan yang mereka buat, bisa saja dapat merugikan para perempuan. Banyak produk hukum dari skala lokal maupun skala nasional yang menyudutkan perempuan. Seperti contoh apa yang ada di Provinsi Riau terdapat kurang lebih 14 Perda yang mendiskriminasikan perempuan (Yopi Pranoto, 2015). Sebagai ruang publik (Wahid, 2013), Politik dianggap sebagai aktivitas yang tidak cocok untuk perempuan, karena bersifat kasar, dan kotor. Dalam pemilihan peranan dan struktur lebih cenderung berlangsung karena pertimbangan seksual. Patriarki menciptakan afiliasi yang menyimpang antara laki-laki dengan perempuan karena sesuai pemikiran yang berbeda-beda berdasarkan kenyataan. Hal tersebut mengkonstruksikan stereotype atas perempuan sesuai perspektif kelompok dominan.

**Gambar 8.0 Konektivitas**



*Sumber: (Cluster Analysis with Nvivo 12 Plus, 2019)*

Berdasarkan gambar 8.0 cluster analysis diatas, menunjukkan konektivitas antara beberapa media dan mendapatkan beberapa variabel permasalahan yang ada dalam partisipasi, analisis cluster juga menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai tingkat kepadatan konektivitas (jumlah garis penghubung) antara media-media yang relevan dan dipilih sesuai dengan popularitas media tersebut. Tinggi nilai kesamaan kontent dari masing-masing media yang dianalisis bergantung pada frekuensi kata yang dibentuk oleh para informan media tersebut (Howard, Kelly, and François 2018). Gambar diatas menunjukkan bahwa adanya nilai kesamaan kontent dari beberapa media website yang dibentuk oleh masing-

masing media, dimana untuk media [Www.Metronews.com](http://www.Metronews.com) 23,54%, disusul oleh media [Www.RRI.co.id](http://www.RRI.co.id) 20,09%, [Www.Gatra.com](http://www.Gatra.com) 12,76%, [Www.Pikiranrakyat.com](http://www.Pikiranrakyat.com) 7,55%, [Www.Balipost.com](http://www.Balipost.com) 6,12%, [Www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id) 3,32%, dan terakhir yaitu [Www.Detiknews.com](http://www.Detiknews.com) 2,58%. Nilai-nilai kesamaan konten tersebut menunjukkan bahwa masing-masing media memproduksi narasi dan opini politik dari informan yang berhubungan dengan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia.

### **Kebijakan Perempuan dalam Politik di Indonesia**

Pada saat pemilihan umum (Pemilu) tahun 2004 di Jember (Angin et al, 2018). Hanya ada 10 partai politik dari 24 parpol yang berlaga dalam pemilihan umum yang berhasil merekrut kandidat perempuan hingga 30%. Dilihat dari kebijakan yang ada, maka 14 partai politik tidak menerima sanksi. Komisi pemilihan umum kabupaten jember hanya memiliki wewenang sebatas untuk membuat informasi publik melalui media massa baik cetak ataupun elektronik. Pemerintah berharap, dengan informasi ini publik akan tahu ada 10 partai politik yang telah mencapai target kebijakan dan 14 partai politik yang tidak sampai target kebijakan. Pengumuman ini juga diinformasikan langsung melalui organisasi masyarakat, salah satunya dilakukan oleh komisioner pemilu selama pada saat jadwal berkampanye. Informasi yang diberikan oleh komisioner melengkapi kampanye “perempuan memilih perempuan” yang dipromosikan oleh aktivis perempuan pada saat itu. Menurut salah satu informan, informasi yang disampaikan oleh komisioner pemilihan sendiri tidak

cukup untuk perolehan suara yang ada, karena semua keputusan diolah oleh partai politik dalam pemilihan.

Keberhasilan dalam memenuhi target implementasi tidak berdampak pada perolehan kursi. Situasi ini telah menarik perhatian para aktor pembuat kebijakan. Perjanjian kebijakan perwakilan perempuan yang telah diterapkan pada pemilihan umum 2009 diubah menjadi lebih tegas. Perjanjian tersebut tercantum dalam UU Pemilu No. 10 tahun 2008, dimaksud dalam pasal 52 mengandung setidaknya 30 persen perwakilan perempuan. Meskipun kebijakan tersebut telah mengatur presentase jumlah kandidat perempuan, yang harus dicapai oleh partai politik, pada kenyataannya tidak semua partai mencapai target. Ada 24 partai politik yang berkontestan dipemilu tahun 2004, tetapi hanya beberapa partai politik yang yang mencapai target.

Komisi Pemilihan Umum membuat Peraturan (PKPU) Nomor 7 tahun 2013 dengan memberikan sanksi untuk partai politik yang gagal mencapai target 30 persen. Sanksi-sanksi ini efektif dalam meningkatkan kinerja partai politik, semua partai politik yang berkontestan dalam pemilu harus mencapai 30 persen.

Dengan adanya kebijakan kuota 30 persen tersebut (Jati, 2016). Maka jatah tersebut dapat dianalisis dengan dua hal, yakni negara mengakui bahwa perempuan mempunyai keleluasaan dalam berpolitik, atau bahkan hanya sebagai pembatasan terhadap representasi perempuan dalam politik Indonesia. Dalam kenyataannya kuota 30 persen sudah diterapkan, dari 9 partai tidak ada

yang mentaati kebijakan 30 persen yang menghadirkan perempuan dalam partai politik. Perwakilan perempuan terendah yang ada di parlemen yaitu PKS yang jumlahnya 5,3 persen, sementara dari Partai Demokrat memiliki perwakilan 24,3 persen. Dengan tidak patuhannya partai politik atas kebijakan 30 persen menjadikan kuota tersebut tidak benar-benar menciptakan ruang politik bagi perempuan dilegislatif. Jatah 30 persen tidak juga dapat mempengaruhi partisipasi politisi perempuan dalam merumuskan Undang-undang maupun kebijakan yang lain. Tidak juga bisa negosiasi politik perempuan dalam membuat kebijakan tertentu. Pada akhirnya jatah 30 persen hanya sebatas pencitraan yang menjelaskan jika perempuan Indonesia diberi keleluasaan untuk berpolitik yang formal.

### **Strategi untuk Meningkatkan Perempuan dalam Politik**

Mewujudkan, membangun dan memperkuat hubungan antar organisasi perempuan yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri mempunyai beberapa asosiasi yang besar pada organisasi perempuan. Semua organisasi mempunyai potensi untuk memperjuangkan/ meningkatkan representasi perempuan didalam politik. Dari segi kualitas mereka bekerjasama untuk menciptakan sebuah energi usaha agar dapat berpeluang; *Kedua*, meningkatkan dan menstabilkan representasi di partai politik. Berusaha dengan optimis untuk menduduki posisi yang strategis dalam partai, seperti posisi ketua dan sekretaris, dari posisi itu hal ini sangat berperan besar dalam memutuskan banyak tentang kebijakan partai; *Ketiga*, advokasi para pemimpin partai politik. Hal ini sangat perlu untuk upaya menciptakan seberapa pentingnya

mengakomodasi perempuan dalam parlemen atau eksekutif, paling utama mengingat dari realita bahwa mayoritas dari pemilih adalah wanita; *Keempat*, mewujudkan akses ke media. Perlu mengingat bahwa media cetak dan elektronik sangat berpengaruh untuk para pembuat kebijakan dan untuk semua masyarakat; *Kelima*, memberikan pemahaman perempuan lewat pendidikan dan pelatihan. Hal ini sangat penting dimana untuk meningkatkan rasa percaya diri pada kemampuan mereka agar dapat bersaing dengan para laki-laki. Dan dapat menanamkan bahwa konsep arena politik terbuka untuk siapa saja atau bagi semua warga negara, politik juga bukan tempatnya untuk konflik dan tidak menakutkan; *Keenam*, kualitas perempuan harus ditingkatkan. Kapasitas yang ditingkatkan atas keterwakilannya perempuan dalam parlemen, atas dasar system yang memproses rekrutmen politik; *Ketujuh*, kuota jumlah anggota di parlemen harus ditingkatkan. Membahas rancangan undang-undang keterlibatan partisipasi perempuan dalam jabatan politik, yang didalamnya dapat mengubah besarnya kuota partisipasi perempuan.

Peraturan perundang-undangan harus dikaji ulang karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, berdasarkan teori yang ada kaum hawa mempunyai legitimasi yang kuat dalam organisasi maupun pada masyarakat. Hal itu yang sifatnya fundamental dapat diyakini dengan perkembangan zaman, dan bisa menatap kesetaraan dengan berkeadilan dan tidak ada yang dimayoritaskan dan diminoritaskan.

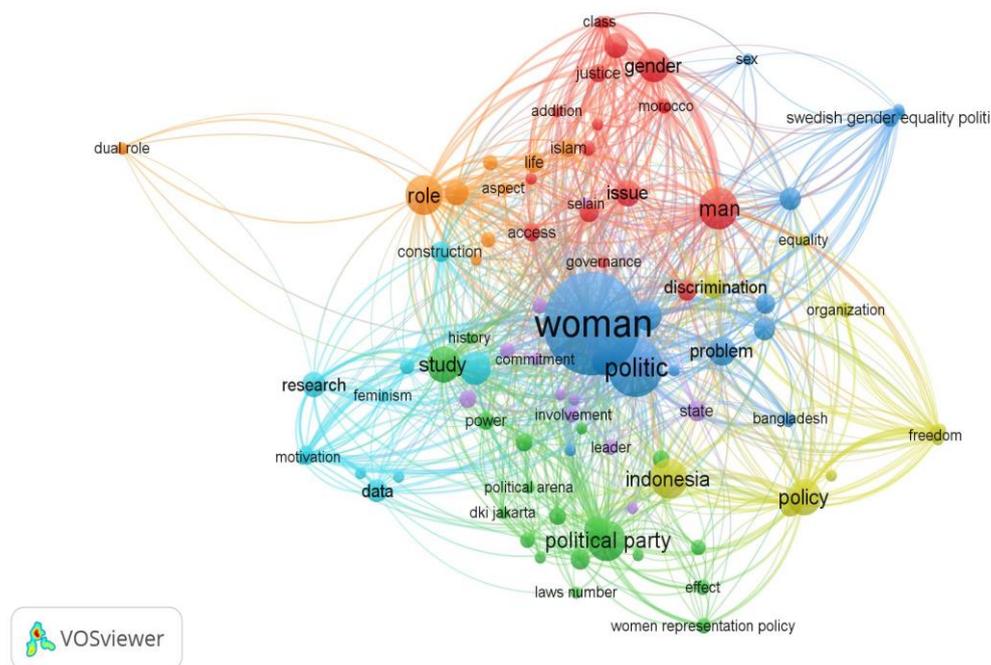
Jika wanita lebih memiliki lebih banyak sumber daya, aktifitas politik mereka pasti akan menyamai aktifitas yang dilakukan oleh laki-laki. Perbedaan

gender dalam pencapaian pendidikan menyebabkan pria memiliki keahlian kewarganegaraan yang lebih besar dan jaringan lebih luas dalam keterlibatan sipil.

### Visualisasi *Network* Peta (Jurnal)

Visualisasi ini digunakan dalam menganalisis seluruh jurnal yang ada dalam penelitian ini dan menciptakan peta jaringan yang dapat menampilkan topik perempuan politik yang paling dominan.

**Gambar 9.0 Visualisasi *Network***



*Sumber: (VOS viewer, 2019)*

Dari gambar 9.0 vosviewer diatas menunjukkan bahwa peta perkembangan penelitian perempuan terbagi menjadi 7 cluster sebagai berikut:

1. Cluster warna merah terdiri dari 19 topik diantaranya adalah *Acces, Addition, Class, Country, Demand, Democracy, Development, Effort, Emergence, Gender, Governance, Issue, Justice, Man, Marocco, Politics, Struggle, Womens Activism, Womens Right.*

2. Cluster warna hijau terdiri dari 19 topik diantaranya adalah *Candidate, Consideration, DKI Jakarta, Effect, Election, History, Impact, Indonesian Government, Laws Number, Observation, Political Arena, Political Party, Power, Reality, Representation, Representative, Study, Women Representation, World.*

3. Cluster warna biru terdiri dari 16 topik diantaranya adalah *Article, Bangladesh, Family, Family Connection, Gender Equality, Ghana, Law, Participation, Patriarchy, Politic, Position, Problem, Sex, Swedish Gender Equality, Wage Differential, Women.*

4. Clsuter warna stabilo terdiri 12 topik diantaranya adalah *Discrimination, Equality, Freedom, Government, Indonesia, International Law, Islamic Society, Islamic Society Organization, Organization, Policy, Political Law, Protection.*

5. Cluster warna ungu terdiri 10 topik diantaranya adalah *Commitment, Involvement, Lack, Leader, Opportunity, Party, Political Right, State, Women, Women Participation.*

6. Cluster warna biru muda terdiri 11 topik diantaranya adalah *Activity, Construction, Data, Feminism, Knowledge, Motivation, Political*

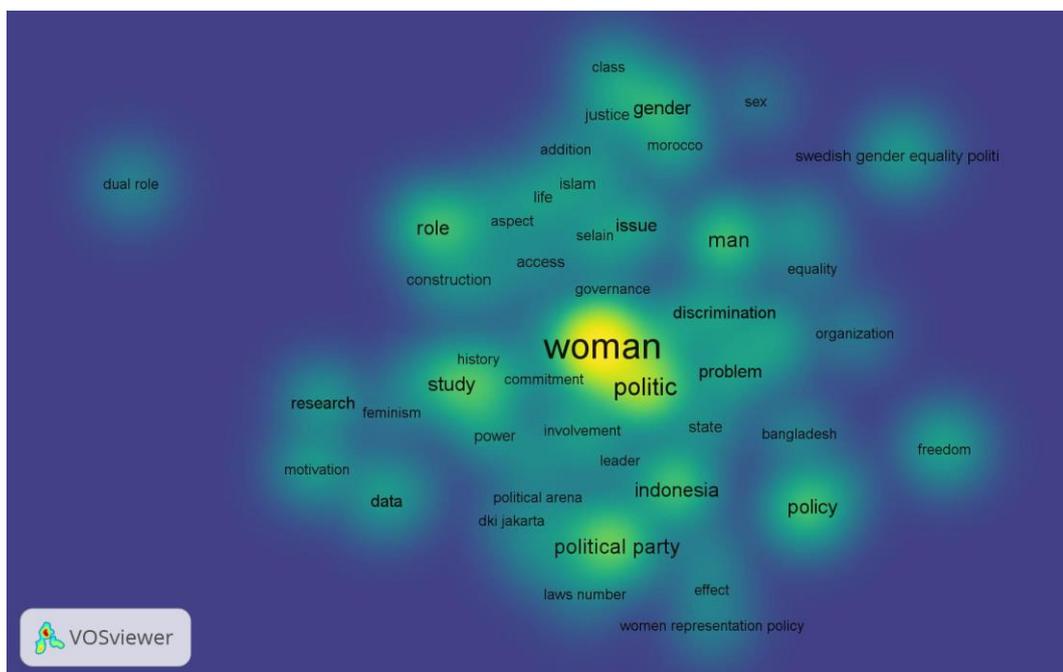
*Participation, Primary Data Source, Research, Wide Range, Womens Political Participation.*

7. Cluster warna orange terdiri dari 10 topik diantaranya adalah *Aspect, Dual Role, Handicraft Industry, Interest, Islam, Life, Political Area, Political Education, Role, Society.*

### **Visualisasi Density Peta (Jurnal)**

Dalam visualisasi density memiliki warna yang tergantung dari kepadatan item. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa warna titik dipeta tergantung pada jumlah item yang terkait dengan item yang lain. Dalam hal ini berguna untuk melihat gambaran dari bibliometrik dengan melihat item yang dianggap penting untuk di analisis.

**Gambar 10.0 Visualisasi Density**



*Sumber: (VOS viewer, 2019)*

Peta densitas yang merupakan hasil analisis yang menggunakan seluruh jurnal, baik yang terhubung maupun yang tidak terhubung. Semakin merah makin padat, dan makin hijau makin jarang. Berdasarkan gambar 10.0 diatas kita dapat menafsirkan keyword yang paling banyak untuk suatu publikasi.